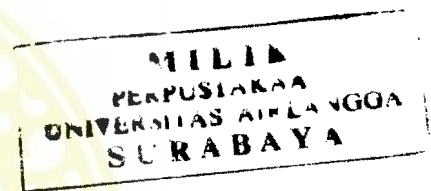


SKRIPSI

AGUS DARMAWAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA DI PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA
DI PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES**

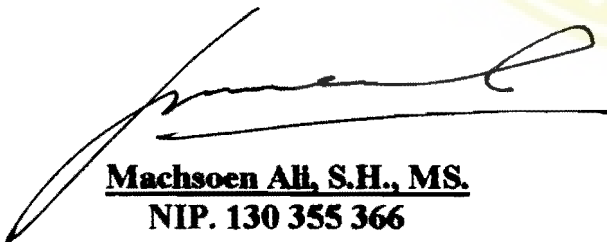


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,



Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366



Agus Darmawan
NIM. 039514239

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT. Keramik Diamond Industries dalam hal melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No.12 tahun 1964 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996. Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya tersebut, PT. Keramik Diamond Industries selalu mendasarkan pada alasan-alasan yang membenarkan pemutusan hubungan kerja tersebut. Setiap pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang terjadi di PT. Keramik Diamond Industries selalu mengajukan ijin pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Dengan demikian PT. Keramik Diamond Industries dapat dikatakan telah melakukan perlindungan hukum terhadap pekerjanya.
- b. Bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja adalah memberikan apa yang menjadi hak-hak pekerja, salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah dengan menindaklanjuti pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya PT. Keramik Diamond

Industries dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja selalu memberikan apa yang menjadi hak-hak pekerja baik itu uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996 mengenai besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian.

Pemerintah yang bertindak sebagai Pengawas sehubungan dengan putusan Panitia Daerah atau Panitia Pusat mengenai pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Pengawasan ini ditekankan pada keaktifan dalam pelaksanaan pemenuhan pemberian uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian oleh Pengusaha dan disamping itu Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyalurkan pekerja pada perusahaan atau proyek lain apabila pekerja tersebut terkena Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran akibat dari tindakan atau akibat modernisasi, otomatisasi, efisiensi, dan rasionalisasi yang disetujui oleh pemerintah. Tindakan Pemerintah seperti tersebut diatas juga dilaksanakan pada proses Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di PT. Keramik Diamond Industries.

4.2. Saran-Saran

- a. PT. Keramik Diamond Industries dalam melakukan pemutusan hubungan kerja hendaknya tetap mempertahankan dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerjanya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila

memungkinkan dapat ditingkatkan sebagai bentuk perwujudan Hubungan Industrial Pancasila.

- b. PT. Keramik Diamond Industries hendaknya segera melakukan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, yaitu pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan yang berlaku dan keaktifan Pemerintah sebagai lembaga pengawas dalam proses pemenuhan hak-hak pekerja setelah proses Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung perlu ditingkatkan.

